

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DIREKSI & KOMISARIS INJOURNEY DESTINATIONS**

Sebagai wujud keterbukaan informasi, Injourney secara berkala menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Direksi dan Komisaris Injourney Destinations kepada publik. Data yang ditampilkan bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk tahun pelaporan 2025, seluruh wajib lapor di lingkungan Injourney Destinations telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN. Namun demikian, data tahun 2025 saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu keseluruhan publikasi resmi melalui sisten e-LHKPN KPK.

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)

Kantor Pusat

Jl. Raya Yogya - Solo Km. 16 Prambanan,
Yogyakarta, 55571
P : +62 274 496 402 / +62 274 496 406
F : +62 274 496 404
E : sekretariat@injourneydestination.id

Kantor Perwakilan Jakarta

Sarinah, Jl. M.H Thamrin No. 11
12A Floor, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
E : jakarta@injourneydestination.id
injourneydestination.id



**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO (PERSERO)**

DIREKSI



**FEBRINA INTAN
DIREKTUR UTAMA**



**JOEL SIAHAAN
DIREKTUR KEUANGAN &
MANAJEMEN RISIKO**



**GISTANG RICHARD .P.
DIREKTUR KOMERSIAL**



**INDUNG PURWITA JATI
DIREKTUR OPERASI**



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FEBRINA INTAN
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 719845

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/243 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	850.000.000
1. MOBIL, MAZDA MAZDA 6 ESTATE Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. MOBIL, VOLKSWAGEN TIGUAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	455.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	649.088.234
F. HARTA LAINNYA	Rp.	160.000.000
Sub Total	Rp.	8.614.088.234
III. HUTANG	Rp.	839.825.679
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.774.262.555

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOEL SIAHAAN
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 869602

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.451.304.011**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/216 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.096.305.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/72 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 527.901.750
3. Tanah Seluas 7.239 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 96.705.161
4. Bangunan Seluas 37 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 730.391.600

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **608.275.000**

1. MOBIL, HONDA BRV 1.5 PRESTIGE CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 113.275.000
2. MOBIL, MITSUBISHI NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **142.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **5.245.108.280**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.997.153.912**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **11.443.841.203**

III. HUTANG **Rp.** **711.227.995**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **10.732.613.208**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap**BIDANG : BUMN/BUMD****LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO****UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **INDUNG PURWITA JATI**
2. Jabatan : **DIREKTUR OPERASI**
3. NHK : **1000358**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.270.370.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.270.370.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 125.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 60.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 60.000.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---****Sub Total** **Rp. 2.515.370.000****III. HUTANG** **Rp. ---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 2.515.370.000****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO (PERSERO)**

KOMISARIS



**M TRI ANDIKA
KOMISARIS UTAMA**



**PANJI TRI UTAMA
KOMISARIS**



**INDIRA ESTIANTY NURJADIN
KOMISARIS INDEPENDEN**



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO

UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. TRI ANDIKA KURNIAWAN
2. Jabatan : KOMISARIS UTAMA
3. NHK : 1001124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.125.000.000

1. MOBIL, AION HYTECH SEDAN SUV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, FORTUNER SUV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
3. MOTOR, NMAX SCOOTER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.400.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 350.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.875.000.000

III. HUTANG Rp. 700.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.175.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO

UNIT KERJA : DEWAN KOMISARIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PANJI TRI UTAMA
2. Jabatan : DEWAN KOMISARIS
3. NHK : 1000287

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 337 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 4.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 307.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI ZX25RR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
3. LAINNYA, SEPEDA ORBEA ORCA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 130.000.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 130.160.300**F. HARTA LAINNYA** Rp. 40.000.000

Sub Total Rp. 7.607.160.300

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 7.607.160.300

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.